

Konsepsi *Corporate Card* Sebagai Uang Persediaan Guna Kelancaran Dukungan Keuangan Operasi Kri

Concept Of *Corporate Card* As Advance Payment For Smooth Financial Support Of Kri Operation

Irvan Buchori, Teguh Santoso, Hilman Fuady

Akademi Angkatan Laut
sriwulanpk99@gmail.com

Alamat: Jl. Bumimoro Morokrengan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Penulis korespondensi: sriwulanpk99@gmail.com

Abstract: This paper discusses the creation of a concept for the mechanism of using *Corporate cards* as a form of advance payment, aimed at supporting financial operations in Indonesian Navy ships (KRI) to ensure smooth processes in preparing ships for sailing. With the development of the Ministry of Finance regulations, the payment mechanism for Advance Payment has changed, divided into two proportions: cash and credit cards. This research is a qualitative study with a descriptive design. The research results suggest that the need for further testing and evaluation of the use of *Corporate cards* in the Indonesian Navy environment. The expected outcome of this research is to bring new innovations in following technological developments to facilitate, accelerate, and overcome obstacles in financial support processes for KRI. Additionally, the presence of *Corporate cards* is expected to address financial issues and prevent new problems from arising due to the misuse of corporate card facilities in supporting ministerial/agency interests and not being used for personal interests.

Keywords: corporate card, technology, finance

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang pembuatan konsep mekanisme penggunaan *Corporate card* sebagai uang persediaan dimana ditujukan untuk mendukung keuangan dalam operasi KRI (Kapal Republik Indonesia) agar terwujudnya kelancaran dalam proses persiapan kapal untuk berlayar. Dengan perkembangan peraturan Menteri Keuangan, pembayaran mekanisme Uang Persediaan mengalami perubahan dengan dibagi menjadi 2 proporsi yaitu dengan secara tunai dan kartu kredit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan untuk perlunya diterapkan dan dikaji lebih lanjut atas uji coba penggunaan *Corporate card* ini di lingkungan TNI Angkatan Laut. Hasil penelitian ini diharapkan membawa inovasi baru dalam mengikut perkembangan teknologi guna memudahkan, mempercepat, dan mengatasi hambatan dalam proses dukungan keuangan terhadap satkai dalam hal ini adalah KRI. Selain itu kehadiran *Corporate card* juga diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan keuangan, dan tidak menjadi bibit baru permasalahan karena penyalahgunaan fasilitas *corporate card* tersebut dalam mendukung kepentingan kementerian/Lembaga serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Kata kunci : *corporate card*, teknologi, keuangan

1. PENDAHULUAN

Tugas Pokok TNI Angkatan Laut sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 pasal 9, diantaranya melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, yang memerlukan kesiapan personal, dukungan logistik dan keuangan yang memadai. Kesiapan kekuatan TNI AL diwujudkan dalam satuan SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu), Dimana KRI sebagai komponen SSAT yang selalu siap sedia berada di lautan untuk menjaga keamanan laut yuridiksi

Received: May 20, 2024; Revised: June 14, 2024 Accepted: June 28, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Irvan Buchori, sriwulanpk99@gmail.com

nasional. Pergerakan operasi KRI berdasarkan perintah yang diberikan oleh Panglima Koarmada untuk melaksanakan tugas tertentu dengan menerbitkan PP (Perintah Pendahuluan). KRI akan melaksanakan kesiapan taktis, personil, dan logistik berdasarkan PP yang ditujukan kepada KRI tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, KRI akan melaksanakan pengajuan kebutuhan keuangan operasi meliputi uang Pemeliharaan Kapal Operasi (HO), Uang Makan Operasi (UMO), Uang Taktis Non Logistik (TNL), Uang Tunjangan Layar, Suku Cadang, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengisian Air. Sebagai Kadeplog bertanggung jawab atas berhasilnya pengajuan kebutuhan dengan memperhatikan administrasi dan permohonan yang dilampirkan.

Dengan perkembangan kondisi keuangan di negara, pelaksanaan penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan kementerian keuangan. Perbaharuan peraturan Menteri keuangan saat ini akan mengikuti perkembangan teknologi dan akan melibatkan lebih banyak peran didalamnya. Perubahan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja prajurit karena memiliki sasaran untuk menyempurnakan pelaksanaan anggaran saat ini. Proses dukungan keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan dukungan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran maka akan dilaksanakan dengan uji coba *corporate card* sebagai uang persediaan. Yang dimaksud *corporate card* disini adalah kartu kredit yang merupakan perjanjian kerja sama antara Kementerian/Lembaga dengan Bank dengan ketentuan yang disetujui bersama. Seluruh transaksi akan tercatat dengan detail karena transaksi dilaksanakan secara non tunai dan dapat meningkatkan fungsi kontrol dalam penggunaan anggaran secara transparan. Dengan harapan tingkat kecepatan dan ketepatan dukungan yang lebih tinggi, akan membantu pengoptimalan fungsi KRI atas tugas pokok TNI AL. Perkembangan kemajuan teknologi dan perubahan peraturan saat ini akan mewujudkan suatu gagasan baru, hal ini menarik peneliti untuk meneliti cara yang dapat berkesinambungan antara kemajuan teknologi, peraturan Menteri keuangan serta visi yang harus terpenuhi.

Beberapa permasalahan ditemukan oleh penulis dan perlu kiranya untuk mendapatkan pemecahannya. Permasalahan tersebut antara lain: 1) Bagaimana peraturan pelaksanaan pembayaran atas belanja APBN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI? 2) Bagaimana pelaksanaan pembayaran Uang Persediaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI? 3) Bagaimana mekanisme penggunaan *corporate card* pada pelaksanaan pembayaran atas belanja APBN untuk dukungan operasi KRI?. Permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dukungan keuangan operasi KRI dalam hal ini penerapan penggunaan *corporate card* yang diselaraskan dengan peraturan Menteri keuangan dan struktur organisasi

serta fungsi TNI Angkatan Laut. Perkembangan pemikiran ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan hambatan dalam dukungan keuangan operasi sebagai modal untuk terlaksana logistik untuk mendukung tugas TNI Angkatan Laut yaitu menjaga kedaulatan negara wilayah laut NKRI. Penelitian yang serupa dengan tulisan ini adalah penelitian oleh Iren Tessa Kapoh (2011), dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Manado. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan. Peneliti yang lain yaitu penelitian Muhamad Rizal Ointu dan Novi Budiarmo (2016), yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada DPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) dengan hasil penelitian bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas dapat mendukung kegiatan dengan maksimal. Selanjutnya penelitian berjudul Optimalisasi Penyaluran UUDP Guna Mendukung Operasi Pelayaran Kapal Secara Maksimal oleh Rizky Wiradiputra (2018), Tujuannya untuk membahas tentang mekanisme penyaluran UUDP yang ada saat ini di TNI Angkatan Laut dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang berlaku sudah harus diperbarui, dengan harapan adanya pembaruan peraturan dan mekanisme akan mempercepat penyaluran UUDP.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif diawali dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penulis memahami permasalahan yang ada dengan teknik pendekatan terhadap subjek penelitian, yaitu dengan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang bersinggungan langsung di bidangnya sehingga dapat menghasilkan data yang terbaik. Penulis meneliti perkembangan peraturan Menteri Keuangan terkait hal dukungan keuangan dalam rangka kegiatan pembinaan operasional dan latihan untuk dijadikan dasar dalam proses UP. Penggunaan uang persediaan atas belanja APBN akan dikembangkan dengan transformasi modern dengan *corpoate card*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyaluran APBN merupakan salah satu fungsional organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam mendukung operasional SSAT. Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang mekanisme penggunaan *corporate card* dalam uang persediaan untuk mendukung operasi KRI secara maksimal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melaksanakan pengambilan data di lingkup TNI AL dan Kementerian / Lembaga yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas peneliti yaitu di Akun Mako Koarmada II, KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355 dan Pangkalan PSDKP Jakarta. Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur kepada:

Tabel 1. Daftar Narasumber

No	Satker (Tempat)	Informan (Pelaku)	Jabatan (Aktivitas)
1.	Akun Mako Koarmada II	Kapten Laut (S) Wahyu Wicaksono	BP Akun Mako Koarmada
2.	KRI Abdul Halim Perdanakusuma - 355	Lettu Laut (S) Darmawan Alif	Kadeplog
3.	Pangkalan PSDKP Jakarta	PNS Ira	Bendahara Satker

Peneliti telah melaksanakan analisis dari data yang telah dikumpulkan yaitu Pelaksanaan PMK 143/PMK.05/2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas belanja APBN saat ini sudah terlaksana dengan baik dan bersifat dinamis apabila menemukan suatu masalah yang terkait dengan durasi waktu masa persiapan KRI dengan waktu berlayar.. Satker yang berkaitan langsung dalam proses dukungan keuangan sudah melaksanakan tanggung jawab secara maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh hambatan yang terjadi dalam dukungan keuangan, dikarenakan kesesuaian sistem yang dihadapkan dengan situasi di lapangan.

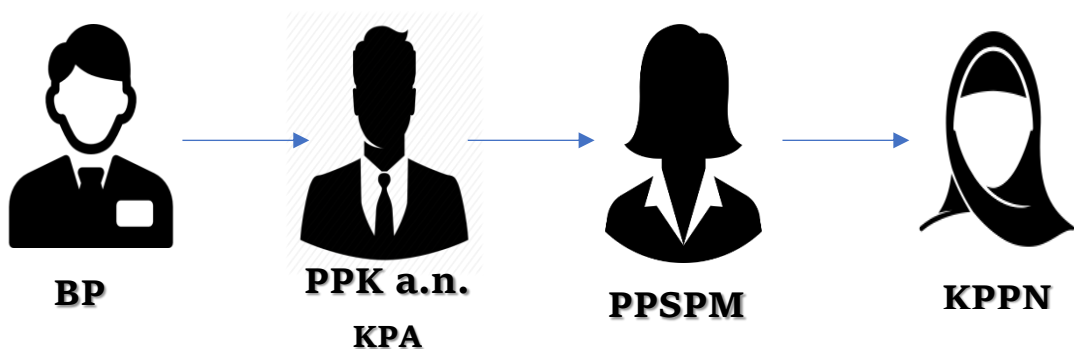
Pada tahun 2017 terdapat penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan atas APBN perlu adanya tindak lanjut guna memperkuat pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam rangka mengimplementasikan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, yaitu pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrument keuangan modern dan mendukung inklusi keuangan, untuk itu dipandang perlu penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran

belanja barang atas beban APBN. Kondisi yang diharapkan ialah seluruh dukungan keuangan terdukung secara tepat waktu dan kurangnya hambatan. Dengan tujuan tersebut peneliti melaksanakan penelitian dengan berpedoman pada PMK 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam hal ini di realisasikan dengan *corporate card*. Peneliti akan membentuk konsep alur penggunaan *corporate card* sebagai sumbangan pemikiran untuk memiliki sistem dukungan keuangan yang diselaraskan dengan kemajuan teknologi, diharapkan dapat bersifat lebih dinamis dan fleksibel dalam menghadapi permasalahan.

Mekanisme pembayaran yang akan diterapkan pada gagasan *corporate card* adalah mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP). Berdasarkan PMK 178/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengelolaan UP tidak dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dan bersifat *revolving* yang bermaksud dapat diisi ulang sesuai dengan batasan dan ketersediaan pagu dalam DIPA. Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker, atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung. Adapun mekanisme penggunaan Uang Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Mekanisme Pembayaran Uang Persediaan

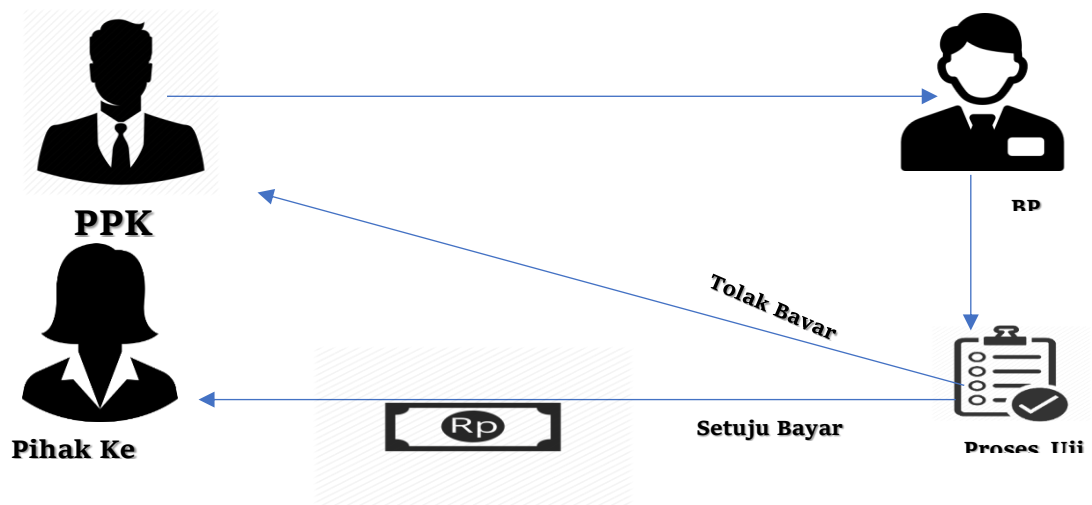
Uang persediaan merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada PA/KPA selaku pimpinan satker dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari dan bersifat *revolving* setelah digunakan minimal 50%. Bendahara Pengeluaran harus melakukan pengujian terhadap perintah bayar dari PA/KPA dikarenakan pertanggung jawaban pembayaran yang dilaksanakan ditanggung secara pribadi. Peruntukan uang persediaan diberikan pada jenis belanja yang tidak direncanakan dengan mekanisme pencairan dana LS, yaitu kalsifikasi jenis Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain



Gambar 1. *Flowchart* Mekanisme Proses Penyusunan Kebutuhan UP

Penyusunan kebutuhan UP dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya PPK melakukan pengujian atas kebutuhan Unit Operasi, kemudian menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) paling lambat 2 hari sejak bendahara menyampaikan kebutuhan UP. PPSPM melakukan pengujian atas SPP-UP yang disampaikan PPK, kemudian menerbitkan SPM-UP paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPP-UP.

Pengelolaan uang persediaan selanjutnya dilaksanakan oleh bendahara yaitu menerima anggaran yang diperuntukkan sebagai uang persediaan satker yang diterima dari rekening kas umum negara. Pada rekening uang persediaan bendahara pengeluaran memiliki nilai tidak lebih dari Rp 50.000.000 (Lima puluh juta ribu rupiah), Besaran UP dan proporsi dapat diajukan perubahan dengan mengajukan permohonan perubahan besaran UP ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb). Berdasarkan PMK 178/PMK.05/2018 mulai 1 Juli 2019, pembayaran UP terbagi menjadi 2 proporsi yaitu 60% tunai dan 40% kartu kredit untuk menyesuaikan pembayaran penggunaan UP dengan kartu kredit. Pembayaran dengan UP didasarkan pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dan dilampirkan dokumen pendukung diantaranya: Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan, dan Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lain yang disahkan oleh PPK.



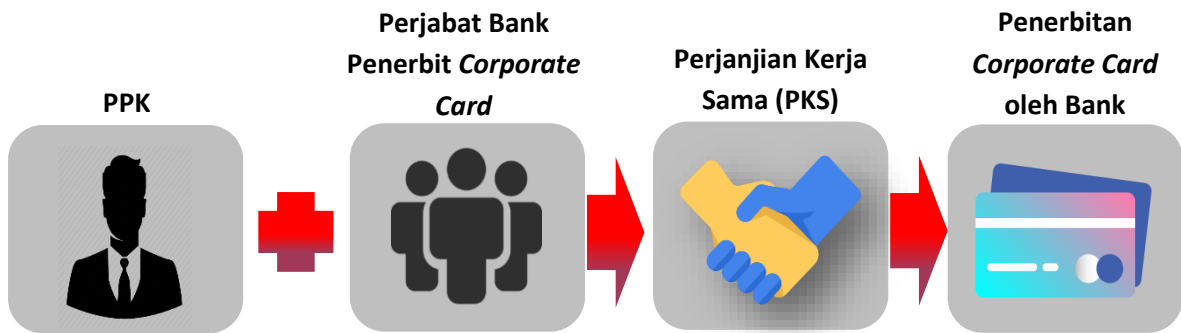
Gambar 2. *Flowchart* Mekanisme Pembayaran Kepada Satkai

Mekanisme pembayaran UP kepada satkai diawali oleh PPK melaksanakan penerbitan SPBy beserta dokumen pendukung kepada Bendahara Pengeluaran kemudian dilaksanakan proses uji dokumen atas SPBy dan kesesuaian pajak atas tagihan. Selanjutnya BP akan mengirimkan uang tersebut melalui rekening atau tunai. Bila dokumen tidak sesuai syarat maka SPBy dan dokumen akan dikembalikan ke PPK. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran wajib membukukan UP yang di kelolanya, berupa jurnal keluar masuk dana yang merupakan laporan penggunaan anggaran. Pembukuan dapat dilaksanakan secara manual ataupun elektronik, pada pembukuan elektronik wajib dilaksanakan pencetakan rutin minimal sebulan sekali. Setiap bulan idealnya dilakukan pemeriksaan fisik UP, untuk menjaga nilai kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan satkai dalam mengelola anggaran, UP yang telah digunakan dapat diajukan penggantian.

3.2 Mekanisme Penggunaan *Corporate Card*

Corporate card merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk dengan atas dasar Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementrian/Lembaga. PKS akan dibuat oleh PPK dengan keputusan KPA dalam menetapkan Bank penerbit dan penandatanganan perjanjian. Selanjutnya PPK mengusulkan nama pemegang kartu kepada KPA dan menyampaikan surat permohonan penerbitan *corporate card* kepada Bank penerbit. Pemegang kartu yang telah ditunjuk menandatangani surat pernyataan Pemegang *corporate card* dan menjadi tanggung jawab penuh dalam penggunaannya.

KPA akan mengawasi penggunaan dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran dengan *corporate card*.



Gambar 3. *Flowchart* Alur Penerbitan *Corporate Card*

Permintaan dukungan akan di verifikasi terlebih dahulu, selanjutnya akan dilaksanakan pendebitan dana oleh pemegang kartu melalui rekening maupun tunai. Pemegang kartu wajib mengumpulkan tagihan/daftar sementara yang memuat rincian transaksi yang dihasilkan oleh sistem perbankan dan bukti-bukti pengeluaran. Penggunaan kartu ini hanya di fokuskan pada belanja keperluan operasional untuk kepentingan Kementerian/Lembaga. Pembayaran tagihan dilaksanakan dengan alokasi waktu 20 hari dari jatuh tempo pembayaran.



Gambar 4. *Flowchart* Alur Penggunaan *Corporate Card*

Pembayaran tagihan ke Bank dilaksanakan dengan jumlah yang tertera pada tagihan, penerbitan akan diterbitkan pada tanggal tertentu sesuai PKS kemudian jatuh tempo 20 hari berikutnya dalam pembayaran. Bendahara wajib membayarkan tagihan dengan cepat dan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan pembayaran yang dibayangi dengan sanksi. Bank akan membantu untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tidak imbul biaya denda keterlambatan melalui pedoman pola pembayaran yang tertib.

3.3 Konsep Alur Penggunaan *Corporate Card* di TNI Angkatan Laut

Berdasarkan mekanisme yang berkaitan, peneliti selanjutnya membentuk konsep alur penggunaan *corporate card* untuk TNI Angkatan Laut. Prosedur yang ada akan di konversi sebagaimana menyesuaikan struktur organisasi TNI Angkatan Laut. Pada penelitian ini peneliti menekankan pada dukungan keuangan operasi KRI yang akan disesuaikan dengan penggunaan *corporate card* dalam mekanisme pembayaran UP dimana Kadeplog atau perwira yang ditunjuk adalah sebagai pemegang *corporate card*. Pemegang *corporate card* memiliki tanggung jawab sebagai pintu transaksi, seluruh kegiatan transaksi akan menjadi tanggung jawabnya. Apabila transaksi yang dilaksanakan tidak lulus dari pengujian PPK, maka transaksi tersebut akan dibebankan kepada pemegang *corporate card* karena telah melaksanakan penyalahgunaan. Proses penggantian UP yang dilaksanakan dengan cara melampirkan Bukti Transaksi, Pertanggung Jawaban Keuangan (PJK) sesuai permohonan dan SPBy yang diterbitkan oleh PPK

Lampiran akan di verifikasi oleh BP sebagai tahap dalam permintaan penggantian UP pada *corporate card*. Selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dan diteruskan kepada PPSPM untuk penerbitan SPM-GUP. Dokumen tersebut akan di ajukan kepada KPPN, dan setelah dikelola akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D di ajukan bank yang telah ditunjuk kemudian pelaksanaan pendebitan dana kepada rekening BP. Setelah pendebitan, saldo UP tersebut akan di kirimkan kepada pemegang *corporate card* sebagai saldo unsur yang telah melaksanakan permohonan penggantian uang persediaan. Penggantian UP akan disesuaikan dengan permohonan pengajuan dalam hal ini PJK yang diajukan, sesuai pagu yang telah disediakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan pembayaran APBN telah berpedoman pada PMK 143/PMK.05/2018 tentang mekanisme pelaksanaan APBN di lingkungan Kemhan dan TNI. Sementara Penggunaan Uang Persediaan akan mengalami perubahan proporsi menjadi 60% tunai dan 40 % kartu kredit. sesuai dengan PMK 176/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran pelaksanaan APBN. Perubahan tersebut dibuat untuk menyesuaikan keputusan pemerintah dalam pembayaran dan penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan APBN. Menindaklanjuti hal tersebut penulis memberikan gagasan penggunaan *corporate card* yang diterapkan dengan mekanisme pembayaran uang persediaan. Sedangkan konsep alur penggunaan *corporate card* melibatkan unsur pejabat KRI langsung yaitu Kadeplog atau perwira yang ditunjuk sebagai pemegang kartu yang bertanggung jawab atas transaksi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan PMK 143/PMK.05/2018 peran tersebut sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP). Gagasan ini bertujuan mendukung permintaan keuangan operasi apabila memiliki masalah dalam anggaran yang ada maupun keperluan yang harus dukung secara waktu yang singkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank BNI, 2018. BNI Corporate Card. [Online] Available at: <https://www.bni.co.id/creditcard/enus/product/bnicreditcardproducts/bnicorporatecard>, [Diakses 25 Agustus 2018.]
- Bank Mandiri, 2018. Mandiri Kartu Kredit. [Online] Available at: <https://www.mandirikartukredit.com/produk/corporate>, [Diakses 25 Agustus 2018.]
- Febrian Singgima. 2016. Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal EMBA. Vol. 4
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 18 September 2018.]
- MayBank, 2018. Kartu Kredit Corporate. [Online] Available at: https://www.maybank.co.id/corporate/creditcard/corporate_card/pages/corporate_credit_card.aspx, [Diakses 25 Agustus 2018.]
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Yurike. S.Pido. 2017. Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pembentukan Serta Penggunaan Uang Persediaan Padakantor Bapelitbangda Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 12 (2). Hal. 77-89.